



MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH (Studi Perbandingan Di SDN 2 Sungai Baung Dan Mi Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu)

¹Abdul Kadir, ²Sudarwan Danim, ³Zakaria

¹Kecamatan Rawas Ulu, ²Universitas Bengkulu, ³Universitas Bengkulu

e-mail: abdulkadir181018@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembiayaan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembiayaan di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi perbandingan. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu. Data penelitian didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Perencanaan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu membuat RKS dan RKAS yang memuat RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah dan belum melibatkan tokoh masyarakat, alumni, pengusaha, anggota profesi; (2) Kedua Sekolah Dasar telah melakukan pengorganisasian pembiayaan yang baik; (3) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun; (4) Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS; (5) Pelaporan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu dilakukan dengan mulai dari penyusunan keuangan sesuai dengan peraturan dan pembiayaan disusun secara rutin setiap tahun.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, Sekolah

Absrack: *This study aims to analyze financial management at the Sungai Baung 2 Elementary School and Madrasah Iftidaiyah Nurul Iman Lubuk Kemang on the aspects of planning, organizing, implementing, monitoring and reporting financing in schools. This research is a descriptive qualitative study with a comparative study approach. The research was conducted at the State Elementary School 2 Sungai Baung and MI Nurul Iman Lubuk Kemang, Rawas Ulu District. Research data obtained from the results of observations, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, several things can be concluded, including: (1) Planning for Financing at the Sungai Baung 2 Elementary School and Madrasah Iftidaiyah Nurul Iman Lubuk Kemang in Rawas Ulu District to make RKS and RKAS containing RAPBS involving school stakeholders and not involving community leaders, alumni, entrepreneurs, members of the profession; (2) Both Elementary Schools have carried out good financing arrangements; (3) The implementation of education financing is in accordance with the prepared plan; (4) SD Negeri 2 Sungai Baung and Madrasah Iftidaiyah Nurul Iman Lubuk Kemang in Rawas Ulu Subdistrict prepare RKS and RKAS which contain the RAPBS; (5) Reporting on financing at the Sungai Baung 2 Public Elementary School and Madrasah Iftidaiyah Nurul Iman Lubuk Kemang in the Rawas Ulu sub-district is carried out by starting from the financial arrangement in accordance with the regulations and the financing is compiled regularly every year.*

Keywords: Management, Financing, School



PENDAHULUAN

Pendidikan membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk penyelenggaraannya. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Jenis atau tingkat pembiayaan pendidikan dengan demikian akan sangat bervariasi. Jadi keuangan atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah menjadi faktor esensial dalam penyelenggaraannya. Penanggung jawab manajemen pembiayaan pendidikan adalah kepala sekolah, dan guru ikut bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Guru diharapkan dapat merencanakan pembiayaan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kebutuhan untuk pembelajaran yang baik tentunya memerlukan pengelolaan pembiayaan yang baik. Kepala sekolah berperan lebih besar dalam tanggung jawab pengelolaan pembiayaan sekolah dan ini merupakan sebuah tantangan yang nyata. Sebagaimana dikemukakan Nyamwea dalam Phylisters dkk (2018) bahwa sebagian besar kepala sekolah bekerja di sekolah yang tidak memadai dalam hal fasilitas fisik dan itulah sebabnya selama konferensi Asosiasi Kepala Sekolah Menengah Kenya (KSSHA) 2011 yang diadakan di Mombasa, tantangan utama yang dihadapi sekolah menengah telah teridentifikasi seperti: kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan, pembayaran biaya yang buruk, kesewenangan dalam pengelolaan sekolah. Sekolah lebih tertantang secara finansial karena sebagian besar siswanya datang dari orang tua miskin yang tidak mampu membayar sekolah yang mengarah ke kinerja akademik yang buruk. Dengan demikian pengelolaan dalam pembiayaan sekolah dengan berbagai karakteristik yang dimiliki sekolah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengelola keuangan sekolah dengan bijaksana.

Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan, sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen keuangan memiliki aturan tersendiri, ada pemisahan tugas dan fungsi antara otoritas, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan otorisator. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan menjabat sebagai otorisator berfungsi sebagai orang yang dapat memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah yang berfungsi sebagai ordonator dapat melakukan pengujian atas pembayaran. Keuangan sekolah dapat diperoleh dari dana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan masyarakat. APBN terdiri dari dana rutin dan dana pembangunan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang penting dan memiliki peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah), dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan pendidikan atau pendanaan pendidikan. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman terhadap berbagai aspek sangatlah penting. Beberapa studi mengemukakan mengenai implementasi biaya pendidikan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Munge dkk ,



(2016) yang mengemukakan berdasarkan temuan studi, disimpulkan bahwa sekolah menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Hal tersebut diperkuat dengan pembuatan anggaran yang dipandu oleh tujuan yang jelas dan ringkas. Sekolah menggariskan dengan jelas pengeluaran dan pendapatan yang sesuai. Studi menyimpulkan bahwa sekolah mengelola anggaran dengan baik sebagaimana dibuktikan dengan kontrol pengeluaran, perencanaan yang sesuai harapan dan pengawasan. Pengelolaan anggaran disimpulkan secara positif mempengaruhi manajemen keuangan di sekolah tersebut. Namun, disimpulkan bahwa ada kelemahan komunikasi yang efektif antar sekolah dan pemangku kepentingan sehubungan dengan sumber dana dan pengeluaran. Hal itu dibuktikan dengan kontrol keuangan yang lemah. Kontrol keuangan disimpulkan menjadi kardinal dalam meningkatkan manajemen keuangan di sekolah.

Menurut Supriadi (2003), pemahaman berbagai aspek yang dimaksud adalah meliputi hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasian, efektifitas dan efisiensi penggunaannya dan akuntabilitas hasil yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya ditingkat sekolah. Dengan demikian, pemahaman dalam pengelolaan pendidikan menjadi hal yang utama. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian yang dikemukakan Phylisters dkk (2018) bahwa pelatihan kepala sekolah mempengaruhi sebagian besar manajemen keuangan dan ada hubungan yang sangat kuat antara pelatihan manajemen dan efektivitas manajemen keuangan sekolah. Kedua dari penelitian yang dilakukan Phylisters dkk (2018) menyimpulkan bahwa pengalaman seorang kepala sekolah sangat diperlukan dalam manajemen keuangan dan bahwa ada koefisien korelasi positif yang kuat antara pengalaman kepala sekolah dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Temuan lain dalam hal ini dikemukakan Myende dkk (2018) berdasarkan penelitiannya yang mengemukakan analisis praktik para kepala sekolah menunjukkan bahwa ada sekolah yang menangani manajemen keuangan dengan cara yang sesuai dan sejalan dengan harapan pemerintah. Penemuan ini penting karena memberikan wacana alternatif yang sudah lama dipegang narasi negatif tentang manajemen keuangan sekolah, baik lokal maupun internasional. Temuan ini dilihat dari perspektif ekonomi berkembang, memberi harapan dan akal dalam pengembangan dan konteks ekonomi maju. Praktik pembiayaan pendidikan yang dilakukan adalah partisipatif dan kolaboratif yang mengarah pada transparansi dan kepercayaan. Integritas moral kepala sekolah dan komitmen diperkuat melalui keberadaan sadar akan tanggung jawab kepala sekolah untuk: akuntabilitas birokrasi; manajemen kepala sekolah dan pendidik (profesional akuntabilitas); sekolah sebagai lembaga belajar dan mengajar (akuntabilitas pendidikan); serta masyarakat luas.

Pengelolaan pendidikan dapat ditinjau dari berbagai hal. Selain pemahaman yang baik dari pengelola keuangan di sekolah, faktor lain yang juga sangat mempengaruhi adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat meningkatkan perasaan memiliki sekolah diantara masyarakat sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pengalaman di beberapa negara yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) selama beberapa tahun menunjukkan bahwa sekolah yang paling berhasil dan diminati masyarakat luas adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerjasama secara aktif mengembangkan sekolah. Sekolah-sekolah ini, baik negeri maupun swasta, adalah sekolah yang dapat mengelola sumber daya sendiri dan melaksanakan kurikulumnya dengan lebih baik. Beberapa bentuk peran serta masyarakat antara lain: menggunakan jasa pelayanan yang tersedia; memberikan kontribusi dana, bahan, tenaga dan konsultasi; serta pengambilan keputusan (Kemendikbud, Unicef dan UN, 2013, 2). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Radzi, et, al. (2015) yang mengemukakan bahwa orang tua akan memiliki kesempatan terlibat dalam keuangan sekolah untuk membuat mereka lebih waspada



tentang anak-anak dan kebutuhan belajarnya. Hal ini pada gilirannya akan membuat orang tua lebih banyak bertanggung jawab untuk bersekolah untuk memastikan kebaikan kinerja anak-anak mereka di sekolah. Partisipasi masyarakat termasuk dukungan dari komunitas sekitar sekolah, masyarakat atau organisasi nonpemerintah, bisnis atau universitas di bentuk kontribusi keuangan atau kerjasama akademik/ nonakademik. Komunitas akan waspada dengan harapan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Oleh karena itu efektif manajemen keuangan berbasis sekolah akan terwujud dengan pemahaman penuh, dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan terkait.

Peran masyarakat dalam pendidikan, yang selama ini digiatkan dalam MBS tercermin dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pada pasal 9 komite sekolah sebagai: (1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat meningkatkan perasaan memiliki sekolah diantara masyarakat sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pengalaman di beberapa negara yang menerapkan MBS selama beberapa tahun menunjukkan bahwa sekolah yang paling berhasil dan diminati masyarakat luas adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerjasama secara aktif mengembangkan sekolah. Sekolah-sekolah ini, baik negeri maupun swasta, adalah sekolah yang dapat mengelola sumber daya sendiri dan melaksanakan kurikulumnya dengan lebih baik. Beberapa bentuk peran serta masyarakat antara lain: menggunakan jasa pelayanan yang tersedia; memberikan kontribusi dana, bahan, tenaga dan konsultasi; serta pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dinyatakan beberapa konsep dasar pada Pasal 1 Ayat 2-5 sebagai berikut: 1) Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, 2) Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya, 3) Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar, 4) Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

Terkait tanggungjawab pendanaan pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Masyarakat yang dimaksudkan meliputi: 1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, 2) Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan 3) Pihak lain selain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.



Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai berikut: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kahavizakiriza dkk (2015) mengkaji bahwa manajemen keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam organisasi mana pun karena mencakup semua teknik akuntansi yang akan membantu memberikan informasi dirancang untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Aringo dalam Kahavizakiriza dkk (2015) memperkuat bahwa penyelenggara pendidikan perlu teratur diinformasikan tentang teknik dan perubahan manajemen baru yang akan membuat program itu bermanfaat. Kepala sekolah perlu *update* teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengarahan sumber daya manusia, keuangan dan material untuk tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan membutuhkan akuntabilitas oleh orang-orang yang memahami manajemen keuangan. Bank Dunia (2001) dalam bukunya laporan perkembangan dunia menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem manajemen publik untuk membuat program lebih efisien dan akuntabel. Untuk memastikan kemajuan sepenuhnya responsif dan akuntabel manajemen, masyarakat sipil harus dilibatkan dalam perencanaan, memantau dan mengevaluasi program dan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud meneliti tentang manajemen pembiayaan sekolah dengan melakukan studi perbandingan pada sekolah yang berbeda. Dengan latar belakang dan keterbatasan yang dimiliki maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tentang manajemen pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sungai Baung dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu. Pada penelitian ini penulis melakukan perbandingan dan analisis pada kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, koordinasi dan pengawasan program kegiatan pembiayaan. Peneliti melakukan analisis pada dua sekolah yang berbeda agar dapat mendapatkan temuan-temuan yang dapat memperkaya data penelitian yang akan dianalisis. Asumsi bahwa dengan sumber daya manusia yang berbeda dan karakteristik yang berbeda, akan memberikan hasil yang berbeda dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan melakukan analisis pada dua sekolah yang berbeda diharapkan peneliti dapat secara spesifik menemukan data-data yang dapat menggambarkan manajemen pembiayaan sekolah dan memberikan gambaran nyata tentang implementasi manajemen pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sungai Baung dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi komparatif. Penelitian ini akan mengungkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas



Ulu. Metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa pada saat penelitian berlangsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Surakhmad (2003) bahwa “Metode deskriptif adalah metode penyelidikan yang diajukan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. Rancangan penelitian merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian karena menggambarkan bagaimana peneliti memperoleh data yang valid dan reliabel sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti. Peneliti menggali data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memusatkan diri pada persoalan-persoalan aktual melalui pengumpulan data, penyusunan data, penjelasan data dan analisis data.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu sebagai sumber data dalam penelitian, sedangkan objek penelitian merupakan fenomena sosial yaitu aktivitas manusia dan peneliti yang melibatkan diri sebagai pengamat dalam proses fenomena sosial yang terjadi, dengan demikian yang menjadi subjek dalam penelitian ini berada di pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu sebagai sumber sumber data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu teknik observasi partisipasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis melalui data-data dokumentasi serta diolah berdasarkan analisis persentase dan kecenderungan (*trend*). Melalui analisis persentase dan kecenderungan (*trend*) yang tepat, peneliti menggabungkan data kualitatif (dari wawancara) untuk menarik dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data versi Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) yaitu model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data

Data penelitian dengan judul “Manajemen Pembiayaan Sekolah sebagai studi perbandingan di SD N 2 Sungai Baung dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu” didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, bendahara dan guru yang ditunjuk oleh pihak sekolah di sekolah yang diteliti. Kedua sekolah penelitian merupakan sekolah dasar yang berada di kecamatan Rawas Ulu. Data penelitian difokuskan pada manajemen pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Islam di Lesung Batu. Adapun untuk manajemen pembiayaan ini, wawancara penelitian dilakukan sesuai dengan instrumen yang telah dirancang, yang terdiri dari lima indikator, yaitu: (1) perencanaan pembiayaan; (2) pengorganisasian pembiayaan; (3) pelaksanaan pembiayaan; (4) pengawasan pembiayaan; dan (5) pelaporan. Pertanyaan wawancara penelitian dengan lima indikator tersebut terdiri dari 88 butir pertanyaan. Data penelitian akan dipaparkan berdasarkan



hasil pengumpulan data yang diuraikan terlebih dahulu manajemen pembiayaan sekolah di SD N 2 Sungai Baung dan kemudian di MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu.

2. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini diuraikan berdasarkan lima indikator yang telah dideskripsikan pada instrumen penelitian, sehingga penyajian data diurutkan berdasarkan indikator yang telah disusun. Pertanyaan dan jawaban diurutkan sebagai berikut: (1) perencanaan pembiayaan diuraikan dengan 2 pertanyaan dan 2 jawaban; (2) pengorganisasian pembiayaan diuraikan dengan 3 pertanyaan dan 3 jawaban; (3) pelaksanaan pembiayaan diuraikan dengan 77 pertanyaan dan 77 jawaban; (4) pengawasan pembiayaan diuraikan dengan 4 pertanyaan dan 4 jawaban; dan (5) pelaporan diuraikan dengan 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Temuan penelitian ini dikemukakan berdasarkan informasi masing-masing sekolah, sehingga diuraikan terlebih dahulu informasi mengenai manajemen pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung kemudian diuraikan informasi mengenai manajemen pembiayaan pada MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu

B. PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu

SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu sama-sama menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah seperti: (1) kepala sekolah, (2) wakil KS, (3) guru, (4) siswa, (5) TU, (6) komite sekolah, dan belum melibatkan tokoh masyarakat, alumni, pengusaha, anggota profesi. Penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah didasarkan pedoman pengelolaan keuangan dijadikan acuan.

Perencanaan yang dilakukan SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ditentukan. Perencanaan pembiayaan di sekolah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, dinyatakan sebagai berikut: a. Biaya di satuan pendidikan terdiri atas: (1) biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap (2) biaya operasi terdiri atas gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (3) bantuan biaya pendidikan adalah bantuan yang diberikan pemerintah dan daerah untuk meringankan biaya pendidikan, dan (4) beasiswa, b. Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/wali dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, c. Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

Perbedaan yang terlihat dalam perencanaan pembiayaan SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu adalah dikarenakan jumlah siswa dan kebijakan yang dibuat sehingga menyebabkan perbedaan jumlah anggaran yang diterima sekolah. Namun demikian pada dasarnya perencanaan pembiayaan di SD Negeri 2 Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu telah terlihat ada. Perencanaan pembiayaan di sekolah perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dan perlu kejelasan dalam pembagian



wewenang. Sebagaimana dikemukakan Fattah (2007) bahwa anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana.

Dalam perencanaan pembiayaan di SD Negeri 2 Sungai Baung maupun MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu, penyusunan perencanaan didominasi oleh pihak internal sekolah, adapun untuk pihak eksternal yang juga merupakan *stake holder* sekolah belum diikutsertakan. Hal ini dapat dijadikan sebuah strategi berikutnya bagi sekolah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Dengan melibatkan pihak eksternal seperti alumni, pengusaha ataupun anggota profesi, dimungkinkan akan mendapatkan pencerahan yang mendukung upaya peningkatan kualitas perencanaan pembiayaan di sekolah. Kerjasama sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah perlu dikuatkan dengan memegang prinsip-prinsip yang baik sebagaimana dikemukakan Tilaar (2004) bahwa kerjasama antara sekolah dan masyarakat hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) inti partisipasi adalah kemitraan (*partnership*) yaitu kesetaraan dan kebersamaan oleh pengembangan konsensus berbagai hal; (2) adanya kemamfaatan dan keuntungan bersama para partisipan, dalam arti unsur merugikan atau pihak secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kadar partisipasi; (3) memberikan suara (*voice*) memberikan peluang hadirnya partisipasi pengakuan keberadaan dan hak orang lain sangat penting untuk mengundang partisipasi mereka; (4) manajemen terbuka dan transparan merupakan prinsip untuk mengundang dan memelihara partisipasi pendidikan masyarakat dan orang tua; (5) saling mempercayai (*mutual trust*) menjadi jiwa partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua; (6) akuntabilitas tidak bisa diabaikan dalam partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua; (7) agar partisipasi hadir berkembang dan berkesinambungan, informasi yang benar, tepat waktu dan bermakna luas tersedia dan disebarluaskan; (8) dan inti lainnya selalu mengusahakan dan membangun pelayanan yang baik semakin baik, orang terus ingin berpartisipasi oleh adanya pelayanan yang baik. Dengan menerapkan prinsip yang dikemukakan, maka apabila dilakukan pelibatan pihak eksternal dalam perencanaan pembiayaan, diharapkan dapat lebih meningkatkan pola perencanaan yang lebih berkembang dan baik bagi peningkatan kualitas pembiayaan di sekolah.

2. Pengorganisasian Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu

SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu anggaran 2019/2020 memiliki jumlah anggaran masing-masing sebesar Rp. 135.723.800,- dan Rp. 74.866.400,-. Kedua SD sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh, memiliki catatan perhitungan biaya pelaksanaan pembiayaan yang dihitung berdasarkan peraturan tentang pembiayaan sekolah.

Kedua sekolah dasar telah melakukan pengorganisasian pembiayaan yang baik seperti dikemukakan masalah pembiayaan sekolah oleh Mustiningsih (2013) bahwa manajemen pembiayaan sekolah adalah pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen pembiayaan yaitu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Dalam pengorganisasian pembiayaan yang dilakukan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Islam Lesung, belum dilakukan pembagian tugas dan wewenang secara spesifik dalam



pembiayaan secara khusus. Pembiayaan secara umum dalam pengorganisasiannya, diberikan kewenangan dalam hal ini yaitu kepala sekolah dan bendahara. Terkait dengan kewenangan dalam pembiayaan khusus, terutama biaya operasional belum terlihat jelas. Dalam hal pengorganisasian pembiayaan ini, idealnya sebagaimana dikemukakan Hariri et al. (2016) bahwa pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pelaksanaannya dengan membagi tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam kelompoknya. Pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana yang telah dibuat dengan membuat pembagian tugas untuk pelaksanaannya.

Dalam pengorganisasian pembiayaan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu, pengorganisasian perlu dilakukan lebih mendalam lagi khususnya dalam pemberian wewenang di sekolah untuk beberapa pembiayaan secara khusus. Sehingga dalam hal tugas dan kewenangan dapat dilakukan dengan lebih terorganisir. Kepercayaan pada orang-orang yang berada di sekolah, yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pembiayaan perlu mulai dilakukan. Sehingga beban dan tanggung jawab tidak hanya dipundak kepala sekolah dan bendahara sekolah. Hal ini diperkuat oleh Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2017) yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengorganisasian seorang pemimpin (*leader*) seyogyanya mengetahui dan memahami *job spesification* (sifat pekerjaan) dari masing-masing personil yang akan diberikan jabatan dalam organisasi. Kemampuan penempatan jabatan merupakan bagian dari pengorganisasian. Dengan ada kerjasama yang baik, transparansi serta kepercayaan antara sesama penanggung jawab, diharapkan memberikan hasil maksimal dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

3. Pelaksanaan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan dilakukan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan terdiri atas: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan tentang pembiayaan pendidikan. Atmaja dkk (2016) mengemukakan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang, terlihat pembiayaan secara operasional lebih dominan kepada hal-hal yang sifatnya formal dan wajib, namun demikian pada pembiayaan dalam bentuk pendukung pembiayaan dalam konteks yang wajib belum diprioritaskan. Hal ini terlihat pada pembiayaan sarana laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium keterampilan, ruang bimbingan konseling,



ruang serbaguna dan ruang ekstrakurikuler belum ada alokasi pembiayaan. Dengan status SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang yang sudah cukup lama melakukan operasional kegiatan sekolah, pada dasarnya perlu dilakukan peningkatan dalam perencanaan dan pengorganisasian sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pembiayaan lebih efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Sebagaimana dikemukakan Ferdi (2013) bahwa pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat. Perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal Pemerintah maupun antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan.

4. Pengawasan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu

SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu telah melaksanakan pengawasan pembiayaan sekolah dengan cukup baik. Pengawasan yang dilakukan di kedua SD dilakukan dengan mulai dari penyusunan keuangan sesuai dengan peraturan dan pembiayaan disusun secara rutin setiap tahun. Kedua sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembiayaan dan masalah keuangan dilaporkan secara rutin.

Pengawasan dalam pembiayaan SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu terlaksana dengan dilakukannya supervisi oleh kepala sekolah, dirancang pelaporan yang sesuai dengan pedoman. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (*auditing*) merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian segala bukti informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang berkompeten dan independen untuk dapat menentukan dan memberi laporan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang pun dilakukan dengan proses pengumpulan dan evaluasi bukti pembiayaan yang telah dilaksanakan. Dalam pengawasan ini, terdapat beberapa jenis sebagaimana dikemukakan Tim Dosen AP UPI (2017) yaitu bahwa audit terdiri atas audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit ketaatan. Audit laporan keuangan, bertujuan untuk menentukan laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan akan diverifikasi telah disajikan secara tepat dan akurat. Audit operasional dilakukan untuk menelaah prosedur dan metode dari suatu organisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Audit Ketaatan, bertujuan untuk melihat apakah organisasi telah mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini secara umum dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan lebih kepada audit laporan keuangan dan audit ketaatan. Sementara itu audit operasional, dimana dilakukan telaah prosedur dan metode dari sekolah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pembiayaan, dilakukan secara langsung pada saat pelaksanaan pembiayaan. Dengan demikian pada dasarnya ketiga jenis audit tersebut telah dilaksanakan baik di SD Negeri 2 Sungai Baung maupun di MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawass Ulu.

5. Pelaporan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu telah dilakukan baik dengan pelaporan kepada pihak yang berwenang dalam bidang pendidikan di daerah dan pusat maupun kepada komite sekolah. Selain itu dalam hal pelaporan pembiayaan di sekolah, hal-hal yang



dilaporkan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan di masing-masing sekolah. Pelaporan juga didasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dalam pembiayaan di sekolah. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan Haryati (2012) bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak tahap: (1) perencanaan pada saat penyusunan dan penghitungan RAPBS, (2) pelaksanaan pada saat pengajuan dan pencairan dana kegiatan, dan (3) pelaporan kegiatan masing-masing program atau pelaporan terpadu pada akhir tahun pelajaran. Monev dilaksanakan oleh penanggung jawab program, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan badan kepengawasan. Tetapi monitoring dan evaluasi tersebut tidak dilaksanakan secara terencana atau terprogram. Walaupun semestinya minimal setiap bulan dilakukan pemeriksaan dan pelaporan oleh kepala sekolah, dan setiap triwulan dilakukan pelaporan secara terpadu penggunaan uang ke Dinas Pendidikan, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian pelaporan pembiayaan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perencanaan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu menyusun RKS dan RKAS yang memuat RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* sekolah seperti: (1) kepala sekolah, (2) wakil KS, (3) guru, (4) siswa, (5) TU, (6) komite sekolah, dan belum melibatkan tokoh masyarakat, alumni, pengusaha, anggota profesi. Penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah didasarkan pedoman pengelolaan keuangan dijadikan acuan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang terlihat dalam perencanaan pembiayaan SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu adalah karena jumlah siswa dan kebijakan yang dibuat karena jumlah siswa yang berbeda juga menentukan jumlah anggaran yang diterima sekolah.
2. Kedua Sekolah Dasar telah melakukan pengorganisasian pembiayaan yang baik. SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu anggaran 2019/2020 memiliki jumlah anggaran masing-masing sebesar Rp. 135.723.800,- dan Rp. 74.866.400,-. Kedua SD sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh, memiliki catatan perhitungan biaya pelaksanaan pembiayaan yang dihitung berdasarkan peraturan tentang pembiayaan sekolah.
3. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan dilakukan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan terdiri atas: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4. Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di Kecamatan Rawas Ulu menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan dengan



- berkoordinasi bersama antara: (1) kepala sekolah, (2) wakil KS, (3) guru, (4) siswa, (5) TU, (6) komite sekolah, dan belum melibatkan tokoh masyarakat, alumni, pengusaha, anggota profesi.
5. Pengawasan Pembiayaan pada SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu dilakukan dengan mulai dari penyusunan keuangan sesuai dengan peraturan dan pembiayaan disusun secara rutin setiap tahun. Kedua sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembiayaan dan masalah keuangan dilaporkan secara rutin. Fungsi pengawasan dalam pembiayaan SD Negeri 2 Sungai Baung dan MI Nurul Iman Lubuk Kemang di kecamatan Rawas Ulu telah dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Atmaja, RM. Teguh Eko, Cut Zahri Harun & Sakdiah Ibrahim. 2016. Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada Sma Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Volume 4 Nomor 1 [119- 128]. ISSN 2302-0156
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- David Wijaya. 2009. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1997. *Pola dan Strategi Pembinaan Pendidikan di Sekolah Dasar: Suatu Pendekatan Pembangunan Sekolah secara Menyeluruh*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar, Ditdikdasmen Depdikbud.
- Fatah, Nanang. 2007. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bai Quraisy.
- Fatah, Nanang. 2006. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.
- Ferdi, W.P. 2013. Financing Of Education: A Theoretical Study. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4 [565-578]
- Hariri, Hasan, Karwan, Dedy H. & Ridwan. 2016. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Media Akademi. ISBN 978-602-6435-29-3
- Haryati, Sri. 2021. Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Magelang. *Journal of Economic Education*, Volume 1 No. 1 [65-70]. ISSN 2301-7341
- Kahavizakiriza, Rose., Kisiangani Benson Walela, Danstanwanyonyikukubo. 2015. Financial Management In Public Secondary Schools In Kenya: A Case Study Of Lurambi SubCounty Kakamega County. *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 4, Issue 09 [167-178]. ISSN 2277-8616
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Komariah Nur, 2018, Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan, Universitas Islam Neger, Indragirii
- Koontz,H. 1984. *Management*. London: McGraw-Hill International Book Company.
- Megiati, Yunita Endra. 2016. Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep Dan Implementasinya. *Jurnal SAP* Vol. 1 No. 2 [126-134]. ISSN: 2527-967X
- Moleong Lexy J., 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi*. Bandung: Remaja



- Rosdakarya. 2005.
- Munge, M. N., M. Kimani & D. G. Ngugi. 2016. Factors Influencing Financial Management In Public Secondary Schools In Nakuru County, Kenya. *International Journal of Economic, Commerce and Management*. Vol Iv, Issue 9 [91-114], ISSN 2348 0386
- Myende, Phumlani Erasmus., Michael Anthony Samuel & Ansurie Pillay . 2018. Novice rural principals' successful leadership practices in financial management: Multiple accountabilities. *South African Journal of Education*, Volume 38, Number 2 [1-11]
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Phylisters, Matula D., Angeline Sabina Mulwa, Dorothy Ndunge Kyalo. 2018. Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya. *International Journal of Education and Research* Vol. 6
- Radzi, Norfariza Mohd., Muhammad Faizal A. Ghani and Saedah Siraj. 2015. Development of an effective school-based financial management profile in Malaysia: The Delphi method application. *Academic Journal*: Vol. 10 No 12 [1679-1694]. DOI: 10.5897/ERR2015.2201
- Sholihat, Siti Saniyyah. 2017. Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol. XXIV No.1 [1-10]
- Sonedi, Zulfa Jamalie & Majeri. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat: Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya. *FENOMENA*, Volume 9, No 1 [25-46]
- Stoop, E. et.al. 1981. *Handbook of Educational Administration: A Guide for the Practitioner (Second Edition)*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.



- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Surakhmad, Winarno. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Tilar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru, Pendidikan Nasional*. Renika Cipta.
- Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*